

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM MASYARAKAT BERDAYA MENUJU KOTA PARIWISATA DI KOTA BLITAR

Fadhila Ayu Ratnasari¹, Arie Ambarwati^{2*}

^{1,2}Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: arie.ambarwati@hangtuah.ac.id

Abstract

This research is motivated by the importance of optimizing the implementation of community empowerment in a program so that it runs in accordance with the policy implementation plans that have been written and compiled. The implementation of the MAYAJUWITA program is regulated by Perwali No. 2 of 2016 concerning the implementing guidelines for community programs towards a tourism city (MAYAJUWITA). This implementation is proven to run with the attention and detailed implementation of the Government as a whole. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The data processing technique uses data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Research Results The implementation of community empowerment in the MAYAJUWITA program in Blitar City was able to run well because the sub-districts and villages of each Blitar City were able to optimize implementing regulations with the budget provided by the APBD PRO RAKYAT.

Keywords: Implementation, MAYAJUWITA Program, Community Empowerment

Pendahuluan

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan di berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi pada tingkatan pemerintahan Kota/Kabupaten adalah pergeseran beberapa urusan kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan atau sebaliknya. Kondisi perubahan ini tentunya membawa perubahan juga terhadap tata laksana penyelenggaraan urusan di tingkat pemerintah kota. Pelaksanaan menurut (Ma'ruf, 2014) adalah suatu proses tindakan lanjut program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategi maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dalam Memperhatikan isu strategis Pemerintah Kota Blitar dalam penyelenggaraan pembangunan periode tahun 2016–2021 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016–2021 menyebutkan salah satunya adalah untuk mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan. Hal ini perlu terus ditingkatkan karena nilai-nilai kebangsaan ini dipandang mengalami penurunan. Nilai-nilai kebangsaan yang menurun ini ditandai dengan antara lain, semakin kecilnya nilai swadaya masyarakat, berkurangnya intensitas gotong royong, menurunnya kedulian terhadap sesama dan adanya persepsi bahwa semua urusan kemasyarakatan adalah tugas pemerintah. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah dapat meningkatkan segala kekurangan Kota Blitar.

menurut Widjaja (2003) dalam jurnal (aceng, 2017) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dimensi-dimensi yang terdapat dalam pelaksanaan menurut (Adisasmita, 2011) sebagai berikut : 1. Melaksanakan semua rencana 2. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 3. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan 4. Siapa yang akan melaksanakan. Dalam menjalani pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah dijalani dikarenakan masyarakat itu sendiri yang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan program dan harus memahami jelas manfaat dari pembangunan pemberdayaan tersebut.

Untuk itu peran keberdayaan masyarakatlah yang dinilai sebagai bentuk pelaksanaan yang harus diutamakan. Masyarakat dapat ikut turun serta dengan cara bergotong royong, menghadiri partisipasi masyarakat guna meningkatkan nilai swadaya. Partisipasi sendiri menurut (Slamet, 2003) menyatakan bahwa, partisipasi mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu : 1) Partisipasi Politik (*political participation*), 2) Partisipasi Sosial (*social participation*) 3) Partisipasi warga (*citizen participation*).

Gotong royong sebagai warisan leluhur dan kearifan lokal yang dapat membentuk jati diri dan kepribadian masyarakat maka nilai-nilai luhur tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi khasanah kekayaan budaya masyarakat indonesia. Sejalan prioritas keberdayaan yang diarahkan pada perwujudan Kota Blitar semakin sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat dengan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan juga diarahkan dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pariwisata untuk mendorong terwujudnya Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata kebangsaan.

Pola pemberdayaan masyarakat atau sering disebut dengan istilah *empowering*, mendapatkan porsi tersendiri dalam perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Berbagai upaya pemberdayaan yang terfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penentuan lokasi kegiatan pembangunan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya. Peningkatan kepada keperansertaan masyarakat, pada umumnya berbentuk peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas kontrol masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan secara umum.

Pelaksanaan Program MAYA JUWITA, akan diprioritaskan dalam pembangunan fisik konstruksi, fisik non konstruksi, dan non fisik. Kegiatan-kegiatan fisik konstruksi yang dilakukan meliputi : pekerjaan rehabilitasi ringan, renovasi ringan, revitalisasi, pengecatan/pemeliharaan serta pengadaan/pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal ditingkat kelurahan/RW/RT yang pekerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil. Kegiatan fisik konstruksi diarahkan pada penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, menarik bagi siapapun yang mengunjungi wilayah tersebut. Selanjutnya Kegiatan Fisik Non Konstruksi dapat berbentuk pengadaan barang non konstruksi yang mendukung peningkatan profil pariwisata Kota Blitar. Adapun kegiatan non fisik dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan sumberdaya manusia (melalui pelatihan,

kursus, pelatihan manajemen pemasaran, packing (pengepakan) promosi, sosialisasi, penyuluhan dalam kerangka pemberdayaan). Dilihat dari uraian diatas yang menjadi permasalahan pada Kota Blitar adalah: 1.) Kurangnya nilai swadaya masyarakat Kota Blitar. 2.) Menurunnya perekonomian masyarakat Kota Blitar.

Berdasarkan uraian diatas maka pemerintah Kota Blitar menetapkan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYAJUWITA) sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pariwisata. Program MAYAJUWITA adalah sebuah kebijakan afirmatif Pemerintah Kota Blitar yang direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang langsung maupun melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Secara filosofis Kata MAYA JUWITA Berasal dari dua suku kata yaitu MAYA yang berarti angan-angan atau cita-cita; dan JUWITA yang berarti cantik atau baik, sehingga bila digabungkan MAYAJUWITA bisa diartikan sebagai angan-angan / cita-cita yang baik yaitu cita-cita terwujudnya masyarakat yang berdaya menuju kota pariwisata.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program desa mandiri energy, oleh (Aisah & Herdiansyah, 2020) penelitian ini menjelaskan tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program desa mandiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini guna meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dengan jalan mengurangi intervensi pemerintah kepada masyarakat dalam berbagai program pembangunan dan memberikan kewenangan secara proporsional dalam pembangunan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa energi alternatif yang diproduksi oleh masyarakat desa Haurngombong adalah biogas dari kotoran ternak sapi yang dikembangkan dengan melalui pemberdayaan masyarakat khususnya peternak sapi. Jenis konstruksi biogas yang dikembangkan adalah plastik, fiber, dan beton. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Siagian S.P dalam (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pelaksanaan dalam program adalah hal yang penting, karena pelaksanaanlah yang mempengaruhi hasil dari pencapaian dalam program tersebut.

Menurut (Subyantoro, 2010) Program sendiri adalah suatu unit atau suatu kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Program diadakan karena untuk mengurangi kekurangan Kota Blitar dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri menurut (Adisasmita, 2006) mempunyai aspek aspek teori, yaitu: Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan sarana, data rencana, serta teknologi); Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); Aspek keluaran dan out put (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Metode

Metodologi yang penulis pakai dalam jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan narasi. Sumber data ini didapatkan penulis melalui pelatihan magang di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Informasi yang didapatkan penulis ini melalui Kepala Kelurahan Karang Tengah, Masyarakat Kelurahan Karang Tengah yaitu kelompok masyarakat pelaksana swakelola (KMPS), dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Tengah. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan menurut Siagian S.P dalam (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program MAYAJUWITA di Kota Blitar ini Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat program MAYAJUWITA, dapat diuraikan sebagai berikut :

Melaksanakan rencan-rencana yang ditentukan pemerintah sesuai dengan peraturan walikota nomer 2 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan program MAYAWITA. Seluruh kecamatan dan kelurahan secara rill akan terlibat dan harus melakukan pengarahan spade etiap masyarakatnya untuk dapat saling berpartisipasi, bergotong royong, dan mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas masyarakat.

Kebijakan Program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA)di Kota Blitar mempunyai karakteristik khusus sebagai prinsip dasar program strategis daerah dalam mewujudkan APBD Pro Rakyat sebagaimana rumusan Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Prinsip dasar dari Kebijakan Program MAYA JUWITA adalah sebagai berikut:

- 1) Stimulan
yaitu Alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan ini lebih bersifat sebagai stimulan. Sehingga diharapkan akan tumbuh kemandirian dimasyarakat berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa swadaya tenaga, material maupun dana. Dengan demikian diharapkan kebijakan ini mampu mengungkit kesadaran produktif masyarakat untuk mampu terlibat, peduli sekaligus berkarya nyata dalam pembangunan.
- 2) Partisipatif
ini mempunyai makna bahwa dalam pelaksanaan program, kelompok-kelompok masyarakat harus terlibat berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 3) Transparan
dalam hal ini mempunyai makna bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya.
- 4) Akuntabel
mempunyai arti bahwa dana yang dipergunakan untuk pembangunan terealisasi dengan bukti adanya wujud bangunan dan dimanfaatkan masyarakat. selain syarat utama tersebut, Dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kearifan Lokal

Dalam pelaksanaannya, Program MAYA JUWITA didasarkan pada optimalisasi sumber daya manusia, sumberdaya produksi dan pasar, sumberdaya alam, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lokal. Selain itu juga perlu mempertimbangkan situasi, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat khususnya yang berhubungan dengan ketrampilan atau keahlian.

Kelembagaan program MAYAJUWITA dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut: Struktur organisasi dalam pengelolaan Program MAYA JUWITA, melibatkan beberapa instansi yang terdiri dari :

1. Tingkat Kota : Tim Monitor dan Evaluasi
2. Tingkat Kecamatan
 - a. Tim Koordinasi Kecamatan& Monev
 - b. Tim Pelaksana tingkat kecamatan
 - c. KMPS
3. Tingkat Kelurahan
 - a. Tim Koordinasi Kelurahan
 - b. Tim Pelaksana
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

Setiap kelurahan dan kecamatan diwajibkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan KPMPS (kelompok masyarakat pelaksana swakelola) yang keanggotaannya diambil melalui warga yang mempresentasikan unsur LPMK, RW/RT dan tokoh masyarakat serta diharapkan mampu memberdayakan masyarakat kelurahan dengan jumlah 7-9 (tujuh-sembilan) orang.

Program MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi dalam perencanaannya dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan, dimana untuk tahap usulan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan yang kemudian pada akhirnya dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) Kecamatan yang bersangkutan.

Program MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non kontruksi dalam implementasinya terbagi dalam berbagai program dan kegiatan yang sasarannya langsung menyentuh masyarakat dalam bentuk non fisik dan fisik non konstruksi, seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan sumberdaya manusia (melalui pelatihan, kursus, diklat, sosialisasi, penyuluhan dll) dan pemberian bantuan alat kerja ataupun barang non konstruksi. Program dan kegiatan MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi yang telah ditetapkan menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan yang dibahas bersama dengan Tim Anggaran melalui Tim Asistensi, sebagai dasar penyusunan APBD.

Setelah mendapat ketetapan alokasi anggaran dalam APBD Kota Blitar, selanjutnya setiap Kelurahan merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang juga dibahas bersama dengan Tim Anggaran melalui Tim Asistensi sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Lurah selaku Pengguna Anggaran. Melalui PPK dan PPTK yang telah ditetapkan, maka setiap kegiatan yang menjadi lingkup Program MAYA JUWITA bidang non fisik dan fisik non konstruksi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan dengan mekanisme pengelolaan berpedoman kepada ketentuan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan pengelolaan keuangan yang diatur dalam peraturan perundangan pelaksanaan pengelolaan keuangan (sistem dan prosedur serta pedoman penatausahaan keuangan).

Anggaran dalam pelaksanaan program MAYAJUWITA ini dibebankan dan ditanggungjawabkan kepada APBD PRO RAKYAT dengan ketentuan yang tertulis. Berikut ketentuan pencairan dana MAYAJUWITA : 1. Kwitansi pembayaran untuk pengajuan uang muka yang 2. Surat perjanjian kerja (kontrak) 3. Rencana pembangunan uang muka disertaidengan foto 0% sebagai dokumentasi. 4. Surat perintah mulai kerja (SMPK).

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, dan hasil pelaksanaan program MAYAJUWITA Di Kota Blitar menurut penulis sudah dilaksanakan dan direncanakan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah kota blitar yang sangat emperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan dan kebijakan perencanaan yang dilakukannya. Kebijakan Program MAYA JUWITA Kota Blitar merupakan salah satu kebijakan strategis yang bersifat khusus dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat menuju pariwisata.

Anggaran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program MAYAJUWITA ini ditanggungjawabkan kepada APBD PRO RAKYAT sesuai dengan ketentuan kwitansi yang berlaku. Pihk tim kecamatan dan tim kelurahan jika tidak melakukan sesuai dengan pelaksanaan dan perencanaan kebijakan yang ditentukan maka harus segera disesuaikan dengan peraturan walikota nomor 2 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan program masyarakat berdaya menuju kota pariwisata (MAYAJUWITA) Di Kota Blitar.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*.
- Agung, A. A., Martono, E., & Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian* (Edisi 4). Kanisius.
- Asabri, K. (2019). *Maya Juwita Inovasi Unggulan Yang Menjadi Pijakan Penguatan Ekonomi Masyarakat Kota Blitar*. <http://kimasabri.id/berita/detail/maya-juwita-inovasi-unggulan-yang-menjadi-pijakan-penguatan-ekonomi-masyarakat-kota-blitar>
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Drajat Kartono, & hanif Nurcholis. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, 1–52.
- Kamil, M. (1998). *pemberdayaan masyarakat*. 1(071116072), 7. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-1n522cc87c61full.pdf>
- Kehik, B. S. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Agrimor*, 3 No. 1(2502), 4–6.
- Kurniawati, D. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*

- Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(4), 9–14.*
- Listyangsih. (2014). *perencanaan pembangunan.*
- Mazmanian, & sebatier. (2014). *pelaksanaan dalam program.*
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (U.-P. Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Miles, & Huberman, A.M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook.* Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (U.-P. Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Moses N. Kiggundu. (1989). *sumber daya manusia.*
- Muchlisin Riadi. (2015). *pengertian dan jenis usaha pariwisata.* <https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pengertian-dan-jenis-usaha-pariwisata.html>
- Mustangin, M., Desy, K., Pramina, N., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji.* 2(1), 59–72.
- Panji, N. (2019). *Pariwisata Kota Blitar Makin Berkembang Dengan Mayajuwita Sebagai Inovasi Unggulan Daerah.* Detail Berita. <http://visitblitar.com/berita-pariwisata/detail/pariwisata-kota-blitar-makin-berkembang-dengan-maya-juwita-sebagai-inovasi-unggulan-daerah>
- Rindi, T. A. (2019). pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata(studi kasus des wonokarto, kec.sekampung kab. lampung timur). In *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO* (Vol. 66).
- Rofiq, A. (2018). *Dosen Sosiologi Unisba Blitar Raih Juara Lomba Perencanaan Kampung Wisata Maya Juwita.* <https://blitar.jatimtimes.com/baca/164374/20180102/183857/dosen-sosiologi-unisba-blitar-raih-juara-lomba-perencanaan-kampung-wisata-maya-juwita>
- Semi athar. (2003). *Menulis Efektif.*
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis.*
- Suharto, E. (2005). *membangun masyarakat memperdayakan rakyat.*
- sulistiyani, ambar teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.*
- Syafar, M. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.*
- Widyaningsih, H. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Sosial Budaya Di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman.* *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation,* 2(1). <https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.16433>